

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
ACEH KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI DPKKA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2018 S.D 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

**REZA RAHMATILLAH
NPM:1802110012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 9 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

REZA RAHMATILLAH
NPM : 1802110012

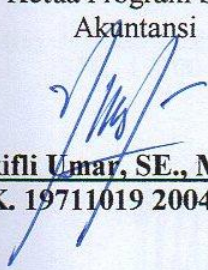
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
ACEH KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI DPKKA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2018 S.D 2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Yusliana, SE., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 9 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

REZA RAHMATILLAH
NPM : 1802110012

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
ACEH KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI DPKKA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2018 S.D 2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 25 Juli 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Irmawati, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE., M.Si
NIK. 19800301 200610 2 001

Anggota

Yusliana, SE., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 9 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Reza Rahmatillah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Rahmatillah
NPM : 1802110012
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI DPKKA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 S.D 2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 9 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Reza Rahmatillah

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada am Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat (Studi Dpkka Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 S.D 2020 ” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. maka pada kesempatan ini, diucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1 Bapak Drs. Tarmizi, S.E., M.Si. M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Irmawati, S.E., M.Si, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Satu, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yuslana, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah membimbing dalam proses penulisan skripsi hingga saat ini.
4. Turut diucapkan terima kasih Kepada seluruh dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, beserta seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Diucapkan terima kasih juga kepada pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah serta Atlet dan Mantan Atlet, baik yang sebagai responden dan informen yang telah memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
6. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan, Algi Waldiansyah, Difki Wardiansyah, Kurnia, Rahman, Muhammad Rofikar, yang telah menemani selama masa studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga ingin diucapkan kepada Ayahanda Budiman Yasin, S.Ag dan Ibunda Hartini serta saudari Syifa Okta Fadilla, yang selalu memberikan semangat dan rasa kepercayaan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini hanya bisa diucapkan terima kasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, amin..... Amin yaa rabbal alamin.

Banda Aceh, 13 Februari 2023

REZA RAHMATILLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1.Landasan Teoritis.....	5
2.1.1 Keuangan daerah.....	5
2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi.....	5
2.1.1.2 Pendapatan dari pusat meliputi	6
2.1.1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6
2.1.2 Anggaran pengelolaan keuangan daerah	9
2.1.2.1 Pengertian APBD.....	9
2.1.2.2 Proses Penyusunan APBD	10
2.1.2.3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD	10
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	12
2.1.3.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	12
2.1.3.2 Manajemen Belanja Rutin.....	13
2.1.3.3 Manajemen Belanja Modal	14
2.1.3.4 Strategi Pemecahan.....	15
2.1.4 Penyusunan Kinerja keuangan.....	16
2.1.5 Indikator Kinerja Keuangan.....	16
2.1.6 Penilaian Rasio-Rasio keuangan Daerah.....	20
2.1.5.1 Pengertian Rasio-Rasio Keuangan Daerah	21
2.1.5.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan	21
2.1.5.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Metode Penelitian	31
3.1.2 Sumber dan Jenis Data.....	32
3.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambara Umum Objek Penelitian.....	34
4.2 Dekripsi Penelitian.....	34
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	35
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU).....	36
4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	
4.3 Estimasi Regresi Data Panel	
4.5 Uji Signifikansi (Uji T)	
4.6 Uji Simultan (Uji F)	
4.7 Estimasi R ²	
4.8 Pembahasan Penelitian	

DAFTAR PUSTAKA.....	34
----------------------------	-----------

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN ACEH KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi DPKKA Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 S.D 2020)**

REZA RAHMATILLAH
NPM : 1802110012

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
Pembimbing II : Yusliana, S.E., M.SI

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini dilakukan pada Kantor DPKA Kabupaten Aceh Barat (Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran belanja pada kantor DPKA Kabupaten Aceh Barat (Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh) Pada Tahun 2018 sampai 2020, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu ini dengan metode kuantitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil yang di peroleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja pada kantor DPKA Kabupaten Aceh Barat (Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh) pada tahun 2018 sampai 2020 cukup efektif dan kurang efisien.

Kata Kunci: Analisis Keuangan, Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah.

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN ACEH REVENUE AND
WEALTH DEPARTMENT OF WEST ACEH DISTRICT
(Study of DPKKA West Aceh District 2018 to 2020)**

REZA RAHMATILLAH
NPM : 1802110012

Advisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
Advisor II : Yusliana, S.E., M.SI

ABSTRACT

This research was conducted at the West Aceh District DPKA Office (Aceh Revenue and Wealth Service) with the aim of finding out how the performance of the expenditure budget at the West Aceh District DPKA office (Aceh Revenue and Wealth Service) In 2018 to 2020, this research uses secondary data sources with The data analysis technique in this study is the quantitative method, which is an analytical method that compares theoretical reviews with the results obtained, then draws conclusions and gives suggestions and the data collection method in this study is the documentation method. The results of the study show that the performance of the expenditure budget at the West Aceh District DPKA office (Aceh Revenue and Wealth Service) in 2018 to 2020 is quite effective and less efficient

Keywords: Financial Analysis, Financial Performance, Regional Income.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Meningkatkan akuntabilitas dan kekeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Komponen PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba, usaha daerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis

pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah.

Berdasarkan latar Belakang di atas, Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, salah satu sumber pendapatan daerah adalah terkait upah pungut pajak daerah, retribusi, pajak bumi dan bangunan daerah (PBB), beberapa hal tersebut merupakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat (Studi Dpkka Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 S.D 2020)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pada dinas pendapatan dan kekayaan aceh Kabupaten aceh barat

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui analisa kinerja keuangan pada dinas pendapatan dan kekayaan aceh kabupaten aceh barat

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diadakan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah kabupaten aceh barat, sehingga anggaran yang disusun mampu efektif dan

efisien dalam realisasinya. Terutama yang berhubungan dengan analisis sumber dan penggunaan anggaran untuk menunjang program yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten aceh barat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pihak Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku eksekutor dalam penggunaan sumber daya penghasilan daerah agar dapat menjadi bahan rujukan dan referensi sehingga bisa mendorong agar lebih meningkatkan sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten aceh barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1. Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dan ilayah daerah yang bersangkutan. Terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru berdasarkan UU NO. 5/ Tahun 1974. Di samping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, di mana menurut pasal 55, sumber pembiayaan daerah terdiri dari 3 komponen besar yaitu:

2.1.1.1 a)Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:

1. Hasil pajak daerah

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Hasil perusahaan daerah (BUMD)

Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

4 Lain-lain usaha daerah yang sah

adalah perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda)

2.1.1.2 b) Pendapatan dari pusat meliputi:

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

2.1.1.3 c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Di antara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam

hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai berikut (Kuncoro,2004):

- a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN
- b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
- c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemerintah propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari propinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah seperti tersebut diatas, peranan dari pendapatan yang berasal dari pusat sangat dominan.

Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat dalam menjalankan praktik sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat. Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 32 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002:43).

Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya undang-undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten Aceh Barat. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, UU itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem desentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 25/1999, Undang-undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak

relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal.

2.1.2. Anggaran Pengelolaan keuangan daerah

2.1.2.1 Pengertian Anggaran pengelolaan keuangan daerah

Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 Desember”. Sedangkan, 11 menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan bentuk rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”

Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006:48), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas”. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 47), “peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan”. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005: 61), “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik terkait dalam proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter”.

2.1.2.2 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan terkaitkan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya 12 menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan. Proses panjang dari penentuan tujuan kepelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006 a:188).

2.1.2.3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga harus menjadi acuan bagi proses pertanggung jawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran 13 lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran 13 lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran, Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah rencana jangka pendek.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Keuangan Daerah

merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran, karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih. Anggaran sebagai alat perencanaan

Fungsi anggaran yang pertama adalah alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian adalah memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran

publik ini dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, fungsi anggaran adalah alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

2.1.3.2 Manajemen Belanja Rutin

Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang tidak dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi pengeluaran rutin daerah. Hal ini berdampak pada kecenderungan berkurangnya perhatian dari para pembuat keputusan (decision maker) anggaran daerah terhadap nilai uang (value for money). Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja yang ditentukan dari pemerintah pusat, yaitu aturan bahwa jumlah pengeluaran rutin yang tertera dalam anggaran daerah adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran rutin. Berdasarkan aturan ini, kinerja pengeluaran rutin dinilai baik apabila realisasinya

sesuai dengan target yaitu semua dana pengeluaran rutin dihabiskan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain masalah ukuran kinerja, permasalahan yang lain yang ada dalam anggaran daerah adalah bentuk dan struktur anggaran rutin yang diseragamkan dalam 10 pos pengeluaran rutin yang diantaranya terdapat tiga pos pengeluaran rutin yang diantaranya terdapat tiga pos pengeluaran yang tidak jelas yaitu belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain dan pengeluaran yang tidak tersangka. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, keberadaan 16 ketiga pos pengeluaran tersebut cenderung memperbesar peluang pemerintah daerah untuk melakukan penyimpangan.

2.1.3.3 Manajemen Belanja Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam pengeluaran pembangunan pun sama dari segi bentuk dan strukturnya yaitu komponen pengeluaran pembangunan juga masih belum dilandasi oleh ukuranukuran kinerja yang baik. Satu-satunya ukuran kinerja yang dipakai adalah aturan bahwa jumlah dana untuk pengeluaran pembangunan yang tertera dalam anggaran daerah adalah jumlah dana maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran pembangunan. Karena ukuran kinerja lainnya tidak ada, maka dasar evaluasi pengeluaran pembangunan akan menggunakan rerata proporsi dana yang akan dialokasikan untuk setiap sektor yang berada di dalam kelompok pengeluaran pembangunan. Dari uraian diatas jelasnya bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan pengeluaran yaitu:

- a. Konsep batas maksimal yang ada pada pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebaiknya diganti
- b. Konsep anggaran tradisional yang membatasi jenis-jenis pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan juga harus diganti untuk memungkinkan klasifikasi jenis-jenis pengeluaran yang lebih rasional sesuai kebutuhan daerah
- c. Untuk identifikasi kebutuhan dana pada pos pengeluaran rutin, ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kerja (work load) dan biaya rata-rata (unit cost).

2.1.3.4 Strategi Pemecahan

Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Walaupun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda merupakan keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktifitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus.

Siklus perencanaan dan pengendalian pada dasarnya terdiri dari lima tahapan aktifitas, yaitu:

- a. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran
- b. Perencanaan operasional
- c. penganggaran
- d. pengendalian dan pengukuran
- e. pelaporan, analisis dan umpan balik

2.1.4 Penyusunan kinerja keuangan

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna 18 pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dari hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:

- 1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- 2) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasipencarian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prioritasnya. Penyediaan informasi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
- 2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus.
- 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
- 4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
- 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil,

Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB.

Prinsip-Prinsip Penganggaran:

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
- 2) Disiplin anggaran Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Keadilan anggaran Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4) Efisiensi dan efektivitas anggaran Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektivitas.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran⁷⁷, mengembangkan disiplin fiskal, 21 mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Dengan melakukan

proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tahunan agar tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah

2. Penerapan penganggaran secara terpadu Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksud untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan

keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.5 Penilaian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

2.1.5.1 a. Pengertian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.5.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001:240) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi.
2. Keputusan pemberian kredit.
3. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
7. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio

kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan

yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

dimana: t_0 = tahun awal t_1 = tahun akhir

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain :

1. Abdullah Febriansyah (2011) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan

mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013.

2. Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014) dengan judul penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara didapatkan kesimpulan yaitu: Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3. Hony Adhiantoko (2013) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011) dengan kesimpulan Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2009 dan 2010 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2018 dan 2020 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43%; 110,63%; dan 114,76%.

Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 88,22%; 108,07%; 111,41%; 98,49%; dan 91,87%.

4. Dyah Purwitasari, Sri Witurachmi, Muhtar (2013) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBD Desa Slemanan menunjukkan kesimpulan Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis perbandingan menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, hal tersebut dapat ditunjukkan baik pada kinerja pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Pada komponen pendapatan dimana data perbandingan yang dijadikan sebagai tahun dasar (pembandingan) adalah tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan dinyatakan cukup baik yaitu ditunjukkan dengan terlampauinya target anggaran sebesar 111,61% atau Rp 274.514.000,00 pada tahun anggaran 2010 dan pada tahun anggaran 2011 sebesar 111,58% atau Rp 267.517.000,00. Begitu juga pada komponen belanja, kinerjanya juga dapat dinyatakan cukup baik meskipun realisasi belanja tahun anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar 100% dari jumlah yang dianggarkan (tidak melampaui target anggaran yang ditetapkan). Namun, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam penggunaan APBDesa Slemanan masih harus diupayakan atau dilakukan penghematan pada beberapa komponen belanja baik pada belanja langsung maupun tidak langsung agar

menunjukkan kinerja anggaran yang optimal. Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang masih dapat dikategorikan cukup baik, namun belum dalam kondisi yang cukup stabil dalam memperoleh sumber dana. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi PADesha pada tahun anggaran 2009 terhadap total pendapatan desa hanya sebesar 33,49%, dimana kontribusi terbesarnya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat yaitu dari komponen Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun pada tahun anggaran 2010 kontribusi PADesha terhadap total pendapatan naik menjadi 39,21%, akan tetapi pada tahun anggaran 2011 kontribusinya turun sebesar 0,92% atau menjadi 38,29%. Kondisi pada keuangan Desa Slemanan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah masih tinggi, karena dalam kurun waktu antara tahun 2009-2011 terlihat bahwa penerimaan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat tinggi yaitu setiap tahunnya lebih dari 50% dari total pendapatan yang dimiliki Desa Slemanan.

5. Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarto (2015) dengan judul penelitian Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Sistem dan Penerimaan PAD yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab DPPKAD kabupaten Minahasa Utara sudah jelas

Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan PAD dilihat dari sisi aturan telah memadai tetapi dilihat dari sisi teori sistem informasi akuntansi pada sistem pencatatan tidak sesuai dengan teori yang ada.

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Halim (2012) Menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, adapun rasio efektivitas keuangan daerah. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio efektivitas keuangan merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan program jika hasil program lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan rasio efesiensi keuangan daerah menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dengan melihat analisis tersebut, dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan (BKAD) Di Kabupaten Majene.

Gambar:1
Kerangka Pemikiran



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Nama Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Abdullah Febriansyah (2015)	Kuantitatif	Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan	Dalam Penelitian ini berfokus pada Analisa Keuangan Dinas Pendapatan Kekayaan Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat	Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan
2.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pendapatan Dan pengelolaan Keuangan Aset Daerah Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014)	Kuantitatif	Standar Pendapatan Daerah Yang Diusulkan Pemerintah Kabupaten	Menganalisa Keungan Dinas Pendapatan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat	Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPKKA
3.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bloro HonyAdhiantoko (2013)	Kuantitatif	Analisa Kinerja Keuangan Daerah	Penelitian ini Berlokasi di Dinas Pendapatan Kekayaan AcehKabupaten Aceh Barat	Kinerja Keuangan Daerah diketahui bahwa rata rata efisiensi keuangan daerahkabupaten Bloro tahun

NO	Judul Nama Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4.	Analisis Perbandingan Dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Data Pada Apbd Dyah Purwitasari, Sri Witurachmi, Muhtar (2013)	Kuantitatif	Analisa Terhadap Sumber Pendapatan Daerah	Perbedaan nya dari segi Analisa Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat	Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi PAD desa
5.	Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarto (2011)	Kuantitatif	Prosedur Penerapan Kebijakan Penerimaan Kas Daerah	Perbedaan dilihat dari segi Analisa Sumber Pendapatan dan Kekayaan kabupaten Aceh Barat	Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPKKA Kabupaten Minahasa Utara

Sumber : Data di olah tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perencanaan dan perancangan penelitian menjadi sangat perlu dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Sugiyono (2016) desain penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Terdapat empat aspek desain penelitian ini yaitu:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat (Studi Dpkka Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 S.D 2020 serta menjabarkan penjelasan berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang menjadi objek pendapatan asli daerah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat (Studi Dpkka Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2018 S.D 2020, serta pertanggung jawaban daerah terhadap pendapatan yang di dapatkan, selain itu juga berkaitan bagaimana pertanggung jawaban terhadap pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Aceh Barat.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi satu tahap, yaitu studi yang dilakukan dengan sekali mengumpulkan data periode, harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. (Susila dan Suyanto 2016).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengembalian sampel yang didalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh kabupaten Aceh Barat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yaitu melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan DanKekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

Wawancara, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan untuk memperoleh informasi mengenai data yang berhubungan dengan penerapan akuntabilitas Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh Kabupaten Aceh Barat (Studi Dpkka Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 S.D 2020 serta menjabarkan penjelasan berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang menjadi objek pendapatan asli daerah.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Dan perbaikan yang sifatnya untuk membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam poses penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambara Umum Objek Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian di Aceh Barat merupakan salah satu Daerah Istimewa yang terletak di ujung laut Pulau Sumatera dan provinsi paling barat di Indonesia, dengan luas daerah mencapai 59.950 km² dan luas wilayah berkisar 3,02 persen dari luas negara Indonesia. Pada tahun 2018 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan dan 6.514 Gampong atau Desa.

Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Aceh (2020) jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah 5.274.871 jiwa. Maka, dalam penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berdasarkan 23 Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel untuk penelitian dalam populasi wilayah Provinsi Aceh.

4.2 Dekripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Selama rentang waktu 4 tahun terakhir tingkat produk domestik regional bruto di Aceh Barat mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 PDRB mencapai Rp 192.074.250,80 (miliar rupiah) meningkat dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 131.585.017,16 (miliar rupiah). Pendapatan asli daerah juga mengalami hal yang sama dimana tahun 2019 sebesar Rp 2.698.912,47 (miliar rupiah) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi pada 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 2.570.775,87 (miliar rupiah). Dana alokasi umum mengalami naik turun dimana yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp 2.382.296,51 (miliar rupiah). Serta dana alokasi khusus pun juga mengalami naik turun dimana yang paling rendah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 129.982,37 (miliar rupiah).

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah, dimana pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output secara agregat selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat kenaikan penggunaan input. Berikut data pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Aceh Barat selama 3 tahun terakhir.

Dapat dilihat bahwa jumlah PDRB (ADHK) yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp 132.074.250,80 (miliar rupiah) namun

pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 131.585.017,16 (miliar rupiah), dimana kondisi tersebut disebabkan karena adanya laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah berdasarkan sumber-sumber dari daerah sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh Barat selama 3 tahun terakhir.

Dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah selama 4 tahun terakhir (dari 2018-2020) cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD sebesar Rp 2.570.775,87 (miliar rupiah). Sumber pendapatan daerah Aceh melalui Pendapatan Asli Daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana, pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah terbesar di Provinsi Aceh.

4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang di transfer pemerintah kepada setiap daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk pemerataan pembangunan. bahwa jumlah Dana Alokasi Umum mengalami naik turun selama 3 tahun terakhir hanya periode 2018-2020 yang mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020

mengalami penurunan sebesar Rp 1.96.192,79 (miliar rupiah). Hal ini terjadi akibat penurunan pada pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah disebabkan adanya refofusing anggaran dari segi alokasi dan diperuntukkan pada DAU yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19.

4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai segala aktivitas khusus yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, namun hanya di tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Dana alokasi khusus pada tahun 2018 sebesar Rp 129.982,37 (miliar rupiah), selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang jauh dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.489.203,02 (miliar rupiah), tahun 2018 menurun sebesar Rp 1.483.635,79 (miliar rupiah), hingga tahun 2020 dana alokasi khusus mencapai Rp 1.762.270,40 (miliar rupiah). Biasanya dana alokasi khusus digunakan untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat. Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yang akan digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Dimana untuk

menentukan model terbaik yang akan digunakan dengan melakukan uji chow (Chow Test), uji hausman (Hausman Test), dan uji LM (Lagrange Multiplier Test).

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan metode Fixed Effect Model yang ditunjukkan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, apabila selama periode 2018 s/d 2020 pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diasumsikan tetap, maka Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat selama periode penelitian tersebut akan meningkat sebesar 17,03941%.

Kedua, nilai koefisien dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,122609 artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat sebesar 0,122609% dengan asumsi variabel lain tetap. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat Periode 2018 s/d 2020.

Ketiga, nilai koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar - 0,143517 yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan dana alokasi umum sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat sebesar 0,143517% dengan asumsi variabel lain tetap. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat periode 2018 s/d 2020.

Keempat, nilai koefisien dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,062556 artinya apabila ada kenaikan dana alokasi khusus sebesar 1

miliar rupiah, maka akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat sebesar 0,062556% dengan asumsi variabel lain tetap. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat periode 2018 s/d 2020.

4.5 Uji Signifikansi (Uji T)

Bahwa nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 17,03941 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0008 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat periode 2018 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai koefisien sebesar - 0,143517 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3019 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat periode 2018 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai koefisien sebesar - 0,062556 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00360 lebih kecil dari $\alpha = 0,04$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi

di Aceh Barat periode 2018 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

4.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan biasanya digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-statistik dari $\alpha = 0,05$, dimana jika nilai probabilitas Fstatistik lebih kecil dari dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat.

H0 : Tidak Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat. Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic dalam metode Fixed Effect Model sebesar 1032,401 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh periode 2018 s/d 2020

4.7 Estimasi R²

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya persentase variasi seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pada tabel 4.5 dapat diketahui nilai estimasi R^2 dalam Fixed Effect Model sebesar 0,996564 artinya sebesar 99,65% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, sementara sisanya sebesar 0,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dimana pendapatan tersebut dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan asli daerah sebagai pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Biasanya pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah. Namun, adanya perbedaan dalam

potensi daerah dapat menyebabkan ketimpangan fiskal dimana setiap daerah yang memiliki potensi yang lebih akan mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak, sebaliknya apabila daerah memiliki potensi yang kurang maka pendapatan asli daerah yang diterima akan sedikit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh, artinya pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dimana, jika semakin tinggi pendapatan asli daerah yang direalisasikan maka akan semakin tinggi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang diperoleh dimana secara parsial pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat

Dana alokasi umum merupakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini disebabkan karena setiap daerah tidak sama dalam membiayai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dana alokasi umum agar dapat mencengah ketimpangan fiskal. Dana alokasi umum sebagai penerimaan

daerah yang persinya lebih besar dibandingkan dengan transfer pemerintah lainnya yang dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan di suatu daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, artinya transfer dana alokasi umum yang diberikan pemerintah memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena penerimaan dana alokasi umum untuk daerah tidak digunakan untuk kepentingan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tetapi kemungkinan dana alokasi umum dipakai untuk belanja rutin yang tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana, seharusnya dana alokasi umum dialokasikan untuk belanja pembangunan berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini yang menjelaskan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah belum memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus yang langsung bersentuhan dengan kepentingan umum yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat

Dana alokasi khusus merupakan transfer pemerintah yang bersifat khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi laju ketimpangan pertumbuhan antar daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin besar jumlah dana alokasi khusus yang diterima pemerintah kab/kota di provinsi Aceh, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana alokasi khusus yang biasanya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi dan kesehatan bisa saja bukan menjadi prioritas pemerintah daerah karena menjadi urusan pemerintah. Misalnya, dana alokasi khusus di beberapa kab/kota yang ada di provinsi Aceh yang mengalami bencana alam berupa banjir, maka dana alokasi khusus akan digunakan untuk menanggulangi banjir tersebut dengan merevitalisasi gorong-gorong. Dimana secara tidak langsung pelaksanaan revitalisasi dapat merusak beberapa infrastruktur yang ada, sehingga hal tersebut yang menyebabkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diperoleh Siswiyanti (2015) yang menjelaskan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima daerah belum tentu tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sementara, secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat dengan menggunakan model regresi data panel berupa Fixed Effect Model (FEM), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat, dimana apabila terjadi kenaikan satu miliar rupiah pendapatan asli daerah maka akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat sebesar 12,26%. Artinya, semakin meningkatnya variabel pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memberikan pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat. Kondisi ini terjadi karena dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah ke daerah belum dapat direalisasikan dengan baik untuk belanja pembangunan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin pegawai sehingga tidak mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat, dimana apabila terjadi kenaikan

satu miliar rupiah dana alokasi khusus akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%.

4. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat. Nilai estimasi R^2 sebesar 0,996564 artinya sebesar 99,65% variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar 0,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dapat merealisasikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di daerahnya masing-masing dengan baik, agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil dan kesejahteraan masyarakat Aceh lebih terjamin.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti belanja modal, dana bagi hasil, kebijakan pemerintah dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat dengan menggunakan model regresi data panel berupa Fixed Effect Model (FEM), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat, dimana apabila terjadi kenaikan satu miliar rupiah pendapatan asli daerah maka akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat sebesar 12,26%. Artinya, semakin meningkatnya variabel pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memberikan pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat. Kondisi ini terjadi karena dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah ke daerah belum dapat direalisasikan dengan baik untuk belanja pembangunan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin pegawai sehingga tidak mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat, dimana apabila terjadi kenaikan

satu miliar rupiah dana alokasi khusus akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%.

4. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Aceh Barat. Nilai estimasi R^2 sebesar 0,996564 artinya sebesar 99,65% variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar 0,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dapat merealisasikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di daerahnya masing-masing dengan baik, agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil dan kesejahteraan masyarakat Aceh lebih terjamin.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti belanja modal, dana bagi hasil, kebijakan pemerintah dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Febriansyah, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Amiluddin, Paulus Uppun, Fitriwati Jam'an, 2013, *Analisis Deskriptif Asli Daerah Kota Palopo*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anim Rahmawati, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta.
- Bastian, 2006, *bentuk rencana kerja*
- Basuki, Agus. T., dan Prawoto, Nano. 2017. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chartika Melisa Pangalila, Lintie, Kalangi, Novi Budiarso, 2015, *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara*, Universitas Sam Ramtulanji, Manado.
- Dyah Puswitasari, Sri Witurachmi, Muhtar, 2013, *Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBD Desa Slemanan, FKIP Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.
- Eka Siwi Hidayanti, 2012, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung*.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hardani, Auliya, N.H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Sukmana, D.J., & Istiqomah, R.R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Halim, A., 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan, "Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Edisi Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Hony Adhiantoko, 2013, *Analisis Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-20011*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ismail, M., 2004, *"Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah"*, FE Unibraw, Malang.

Kuncoro, 2004, Pembiayaan pemerintah daerah

Kemenko Perekonomian. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2021 Menembus Zona Ekspansif'. Diambil pada 27, November 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhanekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif>.

Khusaini, Moh. 2018. Keuangan Daerah. Malang: UB Press

Kusumawati, Lily dan Wiksuana, I.G.B. (2018). "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali". E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 7. No. 5.

Mahsun, 2006, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, BPFE,-YOGYAKARTA, Yogyakarta.*

Mahmudi, 2007, Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* ",*Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta*

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat, C.V ANDI OFFSET YOGYAKARTA*

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Rajawali Pers,Jakarta.*

Mokoworo, Lian, A., Rotinsulu, Debby, Ch., dan Engka, Daisy, S.M. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara". Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 21 No. 04.

Putri, Zuwesty, E. (2015). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 5 No. 2.

Rarung, Patric. (2016). "Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16 No. 03.

Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 104. Jakarta: Kementrian Keuangan.